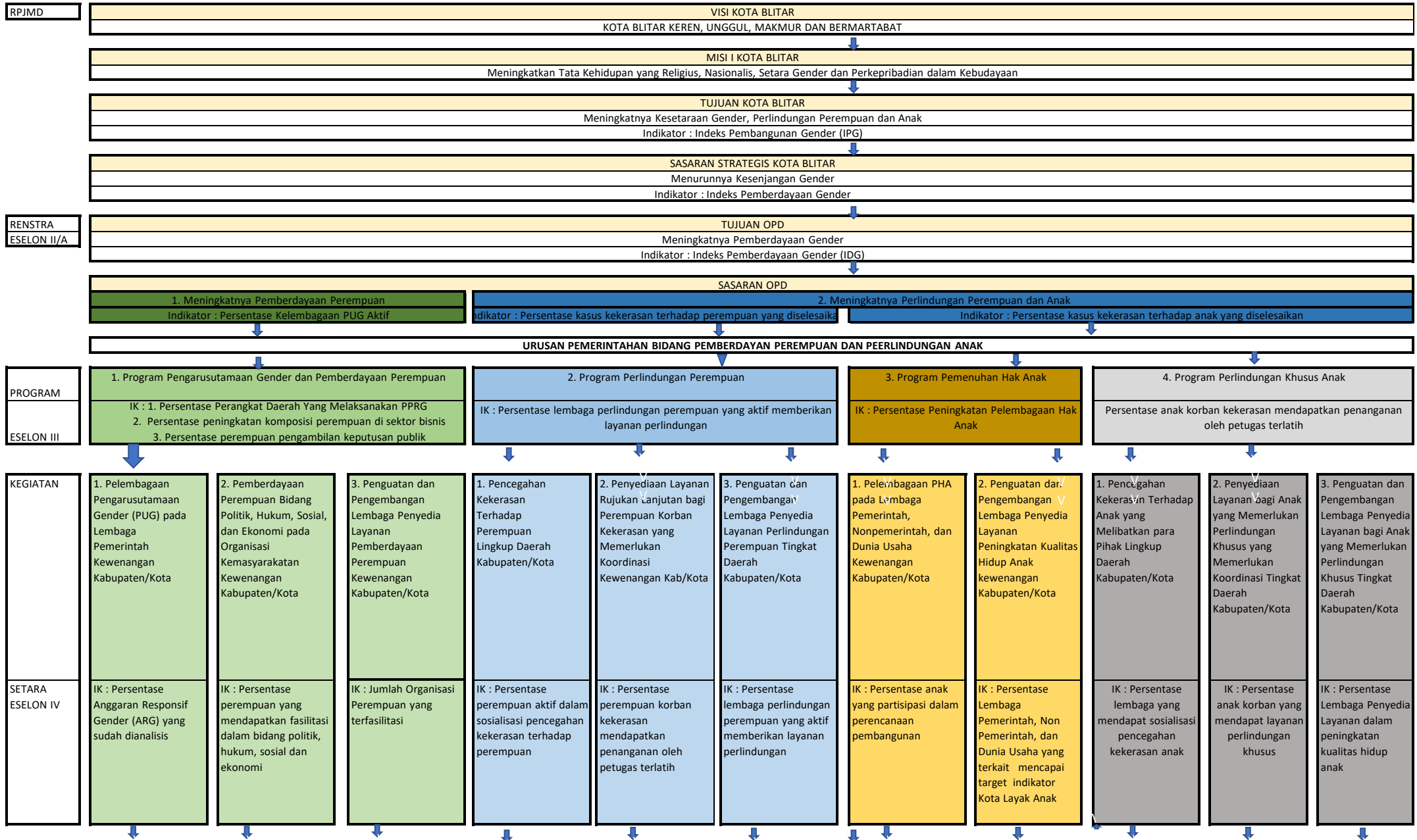


CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA BLITAR

TAHUN 2025

WISI I



SUB KEGIATAN	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota PUG	1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
SETARA ESELON IV	IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi danPendampingan	IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	IK : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	IK : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan kabupaten/Kota	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IK : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	IK : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
				2. Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
				IK : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan

CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA BLITAR

TAHUN 2025

ISI 2

RPJMD	VISI KOTA BLITAR											
	KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT											
	MISI II KOTA BLITAR											
	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia											
	TUJUAN KOTA BLITAR											
RENSTRA ESELON II/A	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM											
	Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)											
	SASARAN STRATEGIS KOTA BLITAR											
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk											
	Indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk											
PROGRAM ESELON III	TUJUAN OPD											
	Meningkatnya Pengendalian Penduduk											
	Indikator : Laju Pertumbuhan Penduduk											
	SASARAN OPD											
	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)											
KEGIATAN SETARA ESELON IV	Indikator : Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	1. Program Pengendalian Penduduk			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana				3. Program Pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
	IK : Rata - rata usia kawin pertama wanita			IK : 1. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber_Kbtidak terpenuhi (Unmet Need) 2. Persentase KB Aktif				IK : Persentase anggota Kelompok Tribina dan UPPKS yang ber KB				
SUB KEGIATAN	1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah			2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas		3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
	IK : Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)			IK : Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia			IK : Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB		IK : Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi		IK : Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
SUB KEGIATAN	1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal			1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		1. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		2. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
SUB KEGIATAN	1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			1. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			2. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas		1. Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	
SUB KEGIATAN	2. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			1. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			2. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)					

SETARA ESELON IV	IK : Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal	IK : Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggara n Sistem Informasi Keluarga	IK : Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia	IK : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	IK : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	IK : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	IK :Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	IK : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	IK : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	IK : Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	IK : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	IK : Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	IK : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan
		3. Pencatatan dan Pengunipulan Data Keluarga	4. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4. Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja					3. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
		IK : Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	IK : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	IK : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media	IK : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		IK : Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan			IK : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang	IK : Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi		
		5. Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)								5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor			
		IK : Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga								IK : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya			

CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR
1 JANUARI 2024

IVISI 5

RPJMD

VISI KOTA BLITAR	
KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT	
MISI V KOTA BLITAR	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	
TUJUAN KOTA BLITAR	
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi	
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
SASARAN STRATEGIS KOTA BLITAR	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	

RENSTRA
ESELON II/A

TUJUAN OPD	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
SASARAN OPD	
Meningkatnya Kinerja Perangkat daerah	
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah	

PROGRAM
ESELON III

URUSAN PEMERINTAHAN	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
IK : Indeks Kepuasan Masyarakat	

KEGIATAN

SETARA
ESELON IV

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
IK : Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	IK : Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	IK : Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	IK : Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	IK : Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	IK : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	IK : Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart

SUB
KEGIATAN

SETARA
ESELON IV

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana	IK : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	IK : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	IK : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	IK : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	IK : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	IK : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
						7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
						IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dankonsultasi SKPD	IK : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	IK : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan			IK : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	IK : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan